

**KERJASAMA PEMDA, POLRES DAN KOREM 061/SK BOGOR DALAM
PENCEGAHAN PROPAGANDA IDEOLOGI RADIKAL DI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015-2016**

**COOPERATION OF LOCAL GOVERNMENT, DEPARTMENTAL (RESORT) POLICE,
MILITARY REGIONAL COMMAND 061/SK BOGOR IN PREVENTION OF RADICAL
IDEOLOGY PROPAGANDA IN BOGOR REGENCY 2015-2016**

Dewi Indri Rianti¹, M. Afifuddin², Bambang Wahyudi³
Universitas Pertahanan
(drizantie@yahoo.com)

Abstrak -- Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan pesat sehingga kompleksitas permasalahan sosial yang cukup tinggi dan heterogenitas masyarakat sangat besar. Salah satu yang menarik adalah berkembangnya berbagai macam ideologi radikal disertai dengan berbagai kasus penangkapan terduga pelaku terorisme dan adanya ego sektoral lembaga yang berwenang. Dalam menyikapi situasi seperti ini dibutuhkan sinergitas lembaga terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif ditengah berbagai ancaman ideologi radikal yang mulai bermunculan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Propaganda Ideologi Radikal di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2016 dan menganalisa kerjasama Pemerintah Daerah, Polres dan Korem 061/SK Bogor, dalam pencegahan propaganda Ideologi Radikal di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2016.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan subjek penelitiannya adalah kerjasama Pemda, Polres dan Korem yang ada di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menghasilkan bentuk propaganda ideologi radikal di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2016 adalah radikalisme agama. Kerjasama Pemerintah Daerah, Polres dan Korem 061/SK Bogor dalam pencegahan propaganda Ideologi radikal di Kabupaten Bogor sudah berjalan dengan baik. Namun, belum ada bentuk kerjasama yang mengikat dan masih terbatas pada koordinasi, pertukaran informasi dan penanganan kasus bersama. Hubungan kerjasama yang terjalin adalah melalui Perhumas, Kominda, Muspida/ Fokominda (Musyawarah Pimpinan Daerah).

Kata kunci: propaganda, ideologi radikal, kerjasama

Abstract - Bogor Regency is a strategic area as buffer of capital city. This is caused of the population growth has increased rapidly so that the complexity of social problems is quite high and heterogeneity of society is very large. One of the interest thing is the development of various radical ideologies, accompanied by various cases of the arrest of unexpected terrorism offender alleged abductions of terrorists and the existence of sectoral ego of institutions. In dealing with such situations, the synergy of related institutions is needed to conduct a conducive situation amidst various radical ideologies that are emerging. The purpose of this research is to analyze Radical Ideology Propaganda in Bogor Regency in 2015-2016 and to analyze cooperation of Local Government, Polres and Korem 061 / SK Bogor, in preventing of Radical Ideology Propaganda in Bogor Regency in 2015-2016.

¹Penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun 2016.

²Brigadir Jendral TNI Dr. M. Afifuddin, S.E., M.M., M.Si (Han) adalah Dosen Tetap Universitas Pertahanan.

³Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.Si., M.M. adalah Dosen dan Kepala Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan.

This research uses qualitative method with descriptive approach. While the subject of research is cooperation between local government, police and Korem in Bogor District.

This research resulted radical ideological propaganda form in Bogor Regency in 2015-2016 is radicalism religion. The cooperation of Local Government, Polres and Korem 061 / SK Bogor in preventing radical ideology propaganda in Bogor Regency has been running well. However, there is no binding form of cooperation and is still limited to coordination, information flow and translation. The Cooperation relationships that exist is through Perhutas, Kominda, Muspida / Fokominda (Regional Leadership Council).

Keywords: Propaganda, Radical Ideology, Cooperation.

Pendahuluan

Globalisasi Media komunikasi memiliki peranan penting dalam era globalisasi.

Globalisasi menuntut adanya komunikasi yang efektif dan efisien sehingga pengirim dapat mengirim informasi yang diterima oleh masyarakat. Media komunikasi memiliki peran yang penting terhadap fenomena terorisme yang berkembang pada saat ini. Hingga setiap instansi yang terkait membutuhkan Hubungan Masyarakat (Humas) yang dapat juga disebut sebagai *Public relation*, karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat. Hal demikian membuat pentingnya lembaga pemerintah dalam hal ini diperlukan juga kerjasama antar lembaga Pemerintah seperti Pemerintah Daerah, Polisi dan TNI. Sebagai aparat yang berwenang dalam menanggulangi permasalahan Terorisme tentu saja dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan propaganda ideologi radikal yang

dianggap sebagai benih munculnya terorisme

Propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal yang menysasar tempat ibadah dan menggalang pengatin (*bomber*) Dani Permana termakan propaganda yang disebarkan Syaeful Zaelani melalu bahan bacaan dan ceramah-ceramah yang menghasut dengan iming apabila menjadi mujahid akan masuk surge dan disambut 72 bidadari. Upaya dalam penanggulangan terjadinya kasus terorisme di Kabupaten Bogor tentu diperlukan kerjasama antara keamanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar kasus semacam Dani dapat di cegah.

Jawa Barat merupakan provinsi yang mengalami aksi-aksi terorisme dan aksi-aksi kekerasan yang paling banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kekerasan yang berlatar belakang agama tampil dalam berbagai bentuknya, seperti demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan, pengrusakan, penganiayaan, dan atau

pembunuhan. Peristiwa yang seringkali dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat merupakan daerah asal dari banyak terjadinya terorisme dan Kekerasan berbasis agama.

Terorisme sudah menjadi sebuah isu global yang sangat dinamis, yang semula dilakukan kelompok Terorisme internasional di Kabupaten Timur tengah dan kini sudah memasuki Kabupaten Asia, dewasa ini sudah mulai memasuki Kota Marawi Filipina, Indonesia haruslah mewaspadaikan akan menjadi ancaman bagi Indonesia karena Filipina terletak berdekatan dengan Indonesia. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam hal ini, yang bekerjasama dengan Polri maupun TNI. Kerjasama lembaga pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan tentu tidak dapat berjalan sendiri menangani kerawanan khususnya di Kabupaten Bogor, kerjasama antara Pemerintah daerah dengan aparat keamanan yaitu Polri dan TNI, hal tersebut menjadi antisipasi dalam masalah ego sektoral dalam pencegahan maupun penanganan ideologi radikal. Terutama ketiga lembaga ini yang membuat hubungan eksternal humas setiap

lembaga menjadikan satu keterkaitan untuk permasalahan internal Kabupaten Bogor, baik humas Pemerintah Daerah, humas Polres Bogor dan humas Korem yang disebut juga sebagai badan penerangan dalam menjalankan kerjasama penanggulangan Propaganda radikal.

Peneliti menjabarkan bahwa dalam pencegahan propaganda radikalisme tersebut tentu perlunya kerjasama dalam menjalankan fungsi proses yang berkelanjutan dari usaha-usaha manajemen pemerintahan untuk terkordinasi secara cepat dan tepat, lebih mendalam. Merupakan fungsi dari Humas setiap instansi secara tidak langsung mengandung makna komunikasi yang saling berkesinambungan dimana terdapat proses timbal balik hingga apabila strategi kerjasama antar lembaga dijalankan secara benar maka propaganda radikalisme yang terjadi di Kabupaten Bogor dapat dicegah maupun ditangani secara tepat oleh lembaga. Humas juga dapat dijadikan proses penerapan kebijakan agar memperoleh kepercayaan publik baik dari internal maupun eksternal, khususnya terhadap lembaga pemerintah yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah, Polisi dan TNI Kabupaten Bogor. Lembaga

ini ditunjuk karena berhubungan langsung dalam penanganan propaganda ideologi radikal dan pencegahan terorisme.

Setiap lembaga memiliki humas dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan komunikasi informasi yang berimbang kepada masyarakat pada umumnya. Berhubungan dengan propaganda ideologi radikal dan terorisme yang terjadi kapan saja, tanpa memandang lokasi dan fasilitas kepentingan umum, namun dapat terjadi di ibukota Negara maupun di Kabupaten pedesaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan membuat keresahan di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Bogor sebagai objek kajian, karena dirasa mulai bermunculan faham dan aliran yang menjerumuskan pada ideologi radikal dan menganalisis kemampuan pemerintah dan aparat yang terkait dalam melakukan kerjasama dalam penanganan ideologi radikal.

Propaganda ideologi radikal dan aksi terorisme sebenarnya tidak bisa dimaknai hanya sebagai tindakan pembunuhan atas kemanusiaan, namun juga sebagai tindakan komunikasi oleh kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha mendapatkan perhatian dari masyarakat, pemerintah

maupun perhatian dunia. Pemberitaan yang ada, dapat menimbulkan aksi terror keresahan terhadap masyarakat. Menjadikan pentingnya peran humas lembaga untuk meregulasikan isu-isu terror.

Sebagai aktor dalam komunikasi politik, pada era ini terorisme menggunakan media masa maupun media sosial untuk membuat *brand image* yang menjadikan alat untuk menyebar luaskan terror dan merekrut anggota mereka atau memperoleh dukungan dari masyarakat. Mula-mula kelompok tersebut menyebar propaganda ideologi radikal untuk melakukan *brain wash* dan mengatasnamakan suatu kelompok agama yang membawa kebenaran untuk disampaikan pada segenap umat yang mengikutinya. Umumnya para teroris tersebut menguasai media sosial karena aktivitas mereka bersifat inkonstitusional. Hingga aktivitas mereka lakukan dalam bentuk illegal. langkah-langkah humas dalam instansi baik pemerintah daerah maupaun aparat keamanan dalam melaksanakan fungsi dalam organisasi yang perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi. Hingga dapat dimaksimalkan fungsinya untuk pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi

radikal dibidang penanggulangan terorisme. Sesuai dengan fungsi humas dalam lembaga itu sendiri dapat memudahkan lembaga dalam monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme khususnya radikalisme.

Upaya pencegahan bertujuan untuk memperoleh *goodwill*, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik untuk masyarakat, Setelah terjadinya bom bali pada tanggal 12 Oktober 2002 Presiden mengintruksikan nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka untuk menanggulangi tindakan terorisme yang dilaksanakan oleh Mentri kordinator bidang politik dan keamanan yang pada waktu itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat strategi dan kebijakan penanggulangan terorisme, hingga menghasilkan, Berdasarkan keputusan nomor: kep-26/ menko/polkam /11/2002 dibentuklah Badan DKPT atau desk kordinasi pembentukan terorisme meliputi tujuannya penangkalan, pencegahan, penangulangan, dan penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang di perlukan, hingga pada 16 Juli 2010 terbentuknya badan penanggulangan terorisme. Namun dalam setiap Kabupaten memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan

ideologi radiklaisme, khususnya dalam kerjasama lembaga dengan aparat dalam hal ini diwakili oleh humas tiap lembaga dalam melakukan pencegahan propaganda ideologi radikal.

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang dalam penelitian. Cara-cara berfikir, berbuat yang disiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk menghadapi suatu tujuan penelitian. Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah atau fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan. Sekalipun, demikian tetap harus diingat bahwa metodologi penelitian merupakan elemen penting.⁴

Pendekatan penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kajian yang diambil yaitu kerjasama Pemerintah Daerah, Polres dan Korem 061/SK Bogor, dalam pencegahan propaganda Ideologi Radikal di Kabupaten Kabupaten Bogor, sehingga penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.

⁴ Burhan Bugin. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta:Rajawali pers) 2012. Hal 76.

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Dari segi penelitian ini, peneliti masih tetap mempersoalkan latar belakang ilmiah dengan maksud agar hasil dapat digunakan untuk menafsirkan analisa dan dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode yang biasanya dimanfaatkan, wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis tetapi perlu perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan

sosial yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman tentang kenyataan-kenyataan tersebut.⁵

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, dalam upaya pencegahan propaganda ideologi radikal dan terorisme dilihat dari peran humas lembaga menjalin kerjasama baik instansi TNI, Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang dalam bagian kehumasan ini terwakili oleh diskominfo. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶

Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatankegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan

⁵ Rosady Ruslan. Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada .2010).

⁶ Nasir Abas. Kajian tentang Terorisme, Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstarahan Kemhan. 2012.

senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan⁷.

Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yang di dapatkan langsung dari sumber penelitian langsung, berupa Informasi maupun dokumen dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Polres Bogor dan Korem 061/SK.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah Pencegahan propaganda Idiologi radikal.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memilih beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis⁸. Peneliti mengamati

fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti dan pengerucutan permasalahan yang akan dijadikan penelitian.

b. Literatur (Pustaka)

Kajian literatur dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian merupakan kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang tepat untuk dijadikan sumber.

c. Wawancara

Wawancara adalah alat untuk melakukan pengecekan kembali atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006, p.97) data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Data dibagi menjadi data primer dan sekunder menurut cara memperolehnya.⁹

⁷ Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. (Bandung : Remaja Rosdakarya.) 2006. Hal 103

⁸ Haris Herdiansyah, 6 Hari Jago SPSS, (Jogjakarta : Penerbit Cakrawala, 2012), hal. 131.

⁹ Abdurrahmat Fathoni. (2006). Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta) 2006.

Data atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara. wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.¹⁰ Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara terbuka dimana peneliti mewawancarai *key informan* maupun *informan* secara sadar dan para *key informan* maupun *informan* mengetahui maksud dari wawancara yang peneliti lakukan. Sehingga peneliti dapat membuat analisis dari hasil wawancara tersebut. Dalam pelaksanaan pengumpulan data dilapangan, peneliti

menggunakan metode wawancara mendalam yang bersifat terbuka.

wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatan dalam kehidupan informan.¹¹

Membatasi wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi. Sundjana juga menambahkan wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).¹²

Teknik ini juga dilakukan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara lebih mendalam dari narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Narasumber yang menjadi *key informan* dan *informan* adalah mereka yang benar-benar mengetahui informasi

¹⁰Hadi Sabari. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2006.

¹¹ Hariwijaya. Metodologi dan teknik penulisan, skripsi, Tesis, dan Disertasi. (Yogyakarta: Elmatara Publising). 2007 hal. 77

¹² Burhan Bugin. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta:Rajawali Pers). 2012. Hal 34

menenai Pencegahan Propaganda Ideologi radikal di Kabupaten Kabupaten Bogor yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Proses wawancara yang peneliti lakukan dengan membuat janji dengan *key informan* dengan menjalankan prosedur secara resmi, hingga memperoleh panggilan untuk melakukan *interview*.

Key informan dalam penelitian ini menunjuk kepada kepala bagian Humas dalam instansi Pemerintah Daerah, Polres Bogor dan Korem 061/SK untuk mendapatkan informasi yang diteliti. Dan Informan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi.

Pembahasan

Kerjasama yang terjalin antar instansi Pemda, Polri dan TNI dalam mencegah propaganda Ideologi radikal karena berhubungan langsung selama penanganan propaganda ideologi radikal. Setiap lembaga pemerintah memiliki humas yang memiliki fungsi dan tujuan, penelitian ini pentingnya kerjasama dalam pencegahan propaganda ideologi radikal. Peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai Kepala Seksi Humas dan Media Massa Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) Kabupaten

Bogor, Bapak Maribun Tua Gultom yang menyatakan bahwa adanya kerjasama namun, belum tertulis. Begitu juga sesuai yang diungkapkan oleh kepala Humas Polres Bogor yaitu Ibu Akp Ita Puspita Lena SH, Tidak ada MoU, namun ada kerjasama dengan Pemda, Kodim (Komando Distrik Militer 0621), kalo dengan Korem sistemnya koordinasi dari Kodim, Pemda terwakili dengan Diskominfo. bila ada kejadian seperti itupun dari Diskominfo, Kodim, dari Kepolisian pasti bertemu dilokasi kejadian. Setiap lembaga pasti memerlukan dokumentasi.

Pengamananpun ada gabungan antara Kepolisian dan Kodim. Kerjasama yang terjadi dalam lingkup Pemerintah, TNI dan Polri ditataran tingkat Kabupaten dijalankan bersama Kodim. Penjelasan pada saat wawancara dengan Korem 061/SK yang diwakili oleh Staf Kasi Korem 061/SK Mayor Aris NL, kerjasama terjalin pada saat Kominda tukar informasi, ada upaya-upaya yang dilakukan terutama pada pertemuan Kominda (Komunitas Inteligen Daerah) hal tersebut adalah upaya prefentif apabila ada hal-hal menonjol maupun perkembangan situasi apabila pergerakan sekecil apapun kita mengetahui situasinya. Namun disisi lain Kepala Bagian Penerangan Korem 061/SK

Kapten S. Lukman Hakim menyatakan bahwa bentuk kerjasama bidang Humas juga merupakan bagian komunikasi antar lembaga tersebut. Humas berkerjasama yang bersifat koordinasi dengan Pemda maupun Polres, sesama humas memiliki wadah perkumpulan yaitu Perhumas (Persatuan Humas) untuk suatu pemberitaan yang terjadi. Dalam herarki organisasi sendiri Korem 061/SK menaungi Kodim 0621 sebagai bagian dari wilayah Korem 061/SK. Kodim yang berkordinasi dan melakukan kerjasama ditataran Wilayah Kabupaten Bogor dengan Diskominfo maupun Polres.

Tanggapan lain juga dari wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Bogor yang juga selaku anggota Muspida Plus Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA. MH. Menyatakan seluruh perangkat Muspida Plus bersinergi, ulama menyatu dan bergandengan tangan dan tokoh agamapun ikut bersinergi. Hal tersebut menggambarkan adanya hubungan baik antar pemimpin lembaga di Kabupaten Bogor. Kerjasama tersebut menurut pandangan BNPT yang diwakili oleh Kepala Subdit Deradikalisasi BNPT Kolonel Sigit Karyadi, SH. MH yang juga sependapat dengan adanya hubungan kerjasama antar instansi untuk melakukan pencegahan Popaganda ideologi radikal

tidak hanya dilakukan oleh BNPT saja namun juga kementerian, Lembaga bahkan masyarakat itu sendiri. Sangat mendasar sekali karena untuk melakukan pencegahan itu dari lini terkecil, dari dasar keluarga hingga lingkungan sekitar hingga jaringan terbesarnya. Tentu dari pendapat tersebut penting sekali adanya kerjasama Instansi pemerintah dan aparat yang berwenang melakukan pencegahan karena pada wilayah Kabupaten dapat mengawasi dan menindak lanjuti secara tepat dan berkala apabila ditemukan kejadian propaganda ideologi radikal.

Bentuk komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selaku Humas Diskominfo juga menyatakan sekretaris daerah sendiri sampai terjun kelapangan untuk mengetahui secara langsung persoalan yang berada diwilayah Kabupaten Bogor dan hal tersebut sekaligus berkomunikasi langsung dengan masyarakat, bentuk komunikasi saat ini antara Pemda dan Polres maupun Kodim cukup solit dan komunikasi yang intensive, tidak hanya berkaitan penggulangan masalah terorisme namun juga keamanan dengan keterlibatan TNI dan Polri disetiap adanya acara di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan acara yang dibuat oleh Pemda selalu dihadiri Humas Polres maupun

Humas Kodim dalam peliputan. Instansi tersebut saling melibatkan satu sama lain. Jawaban berbeda di tunjukan oleh AKP Ita Puspita Leni, SH bahwa kebijakan melakukan Komunikasi bentuk hanya para pimpinan saja, untuk Humasnya belum ada kordinasi, namun saling pimpinan memberikan informasi dan menyalurkan kepada anggota. Masing-masing humasnya memang belum ada kerjasama namun saling kordinasi melalui pimpinan masing-masing lembaga, seperti yang disebutkan sebelumnya adalah Muspida.

Penelitian ini juga menemukan bentuk komunikasi Korem sebagai koordinator Kodim, dan Kodim yang mejalankan kerjasama dengan Polres maupun Pemda tapi Korem juga melakukan hal yang sama dengan Kodim yang memiliki alur komunikasi berupa Kominda setiap bulan dilaksanakan di jajaran Korem (diwilayah kodim jajaran korem) berkesinambungan, para Intelejen melakukan pertemuan, begitu juga Kesbangpol Linmas, Kepolisian Kasad Intelkam, di TNI ada Kasi Intel.

Pola Komunikasi yang terjalin pada hubungan kelembagaan ini bersifat korisontal saling berkordinasi bukan instruksi karena memiliki level yang sama

kecuali Korem yang memiliki herarki dengan Kodim.

Propaganda Ideologi Radikal yang Mengarah Pada Tindakan Terorisme

Pencegahan propaganda ideologi radikal menurut Diskominfo, Pemerintah Daerah mengacu pada kata-kata Panglima mengenai masyarakat harus peduli dengan lingkungannya baik tingkat Kecamatan maupun Desa Babinsa, Babinmas. Dari tingkat dasar lingkungan tentu dimulai dari kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan propaganda ideologi radikal dengan memiliki kesadaran terhadap ancaman tersebut. Sedangkan menurut pendapat dari Humas Polres Bogor bahwa pencegahan dilakukan oleh bidang inteligen Polres Bogor dan Humas Polres Bogor lebih mengarah kepada informasi kepada masyarakat.

Salah satu bentuk proganda untuk menunjukkan sikap agar masyarakat mengikuti hal yang serupa. menurut Mayor Aris NL, bagian dari pembakaran umbul-umbul salah satu bagian dari propaganda mereka juga untuk tidak mengakui pancasila ataupun bendera sebagai lambang, oknum dari yayasan Ibnu Mas'ud lebih cenderung mengutamakan keinginan atau ideologi

mereka kearah sisi keagamaannya ataupun radikal kanan. Mayor Aris menjelaskan mengenai jenis propaganda dari koten yang disebarkan oleh para progandis dalam bentuk mengarah kearah radikal kanan atau kiri. menjelaskan juga mengenai propaganda yang dilakukan oleh radikal kiri belum ditemukan secara jelas siapa pelakunya. Terdapat penemuan di wilayah Ciomas terdapatnya lambang palu arit dan selebaran lain yang menyangkut radikal kiri dan komunis menyikapi hal tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan kepolisian karena pihak kepolisian yang akan menyelidiki dan menindak lanjuti penemuan tersebut.

Propaganda kanan maupun kiri keduanya terdapat di Kabupaten Bogor hingga pencegahan propaganda ideologi radikal memang harus secara *holistic*. Program pencegahan yang dilakukan oleh Korem 061/SK Bogor, melakukan sosialisasi kepada LSM maupun Ormas baik Kabupaten maupun Kota Bogor. Bentuk kegiatannya seperti pendidikan Belanegara, secara langsung juga mengenalkan kepada masyarakat adanya program dari bidang Teritorial Korem 061/SK. Selain itu juga terdapat program wawasan kebangsaan dari mulai tingkat Babinsa sampai tingkat Danrem, tingkat kecamatan Babinsa sampai tingkat

Danranmil kemudian tingkat Kabupaten ada Danranmil dan Danrem¹³.

Sedangkan menurut Kolonel Sigit Karyadi Kepala Subdit Reso Shab Deradikalisasi BNPT mengatakan di Philipina Propaganda dulu menggunakan telegram baik digunakan dalam Negri maupun luar negri, karena telegram sendiri memiliki kapasitasnya cukup besar untuk bergabungnya anggota dalam ruang chat sehingga bisa memuat beberapa ajakan, rekrutmen, propaganda. Hingga BNPT mengajukan penutupan pada aplikasi telegram sehingga dapat dilakukan koreksi pada aplikasi tersebut. Saat ini konten media seperti penggunaan telegram adalah propaganda yang marak dikalangan anak muda dengan penggunaan media-media sosial semacam itu. Dahulu penggunaan selebaran untuk menyebarkan propaganda, fasilitas-fasilitas tempat ibadah yang bahkan oleh para mereka yang disebut para mujahidin-mujahidi mereka berpura-pura mencari tempat ibadah yang tidak terurus itu mereka menjadi marbot atau penjaga rumah ibadah, dengan kemampuan yang baik dan mereka rajin. Bahkan mereka

¹³ Wawancara tatap muka, Mayor Aris NL, Kasi Intel Korem 061/SK Bogor. November 2017 Bogor

memanfaatkan keilmuan dengan menjadi guru mengaji. Sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Saat ini pola propaganda yang demikian mudah dideteksi dan diamatain masyarakat. Saat ini dengan menggunakan media sosial dan internet bagi mereka penyebar ideologi radikal, itu fasilitas yang lebih efektif dan aman.¹⁴

Melihat upaya BNPT memang yang memiliki tupoksi secara jelas mengenai penanganan Ideologi radikal. BNPT mempunyai Pusat media damai dan PUSAKA (Pusat Informasi dan Komunikasi BNPT). BNPT mempunyai kendali untuk melihat konten-konten negarif, konten propaganda yang sifatnya mengarah pada radikal teroris. BNPT sendiri lembaga non-kementerian sesuai dengan perpres yang fungsi dan tugasnya mencegah propaganda ideology radikal memiliki kewenang nasional.

Komunikasi sebuah lembaga dalam melakukan kerjasama tentulah membutuhkan peran penting *public relation*. Humas melakukan hubungan langsung dengan publik. Fungsi humas sendiri dalam lembaga seperti layaknya citra dalam instansi maupun lembaga hal tersebut karena memalaui humaslah

setiap informasi yang akan keluar masuk melalui satu pintu yaitu humas untuk menghindari kesimpang siuran informasi dan berita yang beredar dimasyarakat luas. Dalam hal ini kerjasama antar instansi terutama Humas Pemda Kabupaten Bogor yaitu diskominfo harus menjadi corong seluruh hubungan komunikasi antar lembaga. Fungsi humas sendiri yang dijalankan oleh Humas Polres Bogor dari hasil wawancara tugas yang dijalankan Humas kepolisian yaitu mendokumentasikan temuan dilapangan, mengshare informasi kepada masyarakat dan tentunya yang tidak meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tidak semua hal yang didapat oleh kepolisian disebarkan ke masyarakat. menurut AKP Ita juga mengatakan bahwa di Kabupaten Bogor berkumpulnya informasi di Diskominfo, dan Polres Kabupaten Bogor juga memiliki media center dan wartawan yang menjadi jembatan. Humas Polres Bogor lebih mengarah kepada informasi kepada masyarakat. Humas hanya meliput, mendokumentasikan kegiatan yang ada dilapangan karena dapat menjadi alat bukti bagi Polres dalam penanganan kasus.

Sedangkan Menurut Bapak Gultom selaku kepala Humas dan Media Diskominfo, terdapat layanan pengaduan

¹⁴ Wawancara tatap muka dengan sigit Karyadi, KA Subdit Deradikalisasi BNPT. September 2017.

media, Untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Juga terdapat radio Tegar Beriman 9,3 FM, majalah Inovasi terbit 1 kali dalam sebulan, website Bogorkab.go.id dan media cetak harian. Setiap humas lembaga dan instansi memiliki forum untuk saling bertukar informasi dalam organisasi perhumas, yang juga terdapat disetiap daerah.¹⁵

Berbeda nama struktur di Korem 061/SK, Humas disebut sebagai Pusat Penerangan atau Puspen namun secara fungsi dan tugas tidak berbeda dengan Humas. Puspen yang dikepalai oleh Mayor Lukman juga menjelaskan bahwa Puspen memiliki kerjasama dengan media-media lokal yang ada di Bogor hampir semua kerjasama baik cetak/elektronik seluruh yang ada di Kabupaten Bogor. Isi materi dalam pemberitaan Korem lebih banyak membuat himbauan sebagaimana kemudian disebarkan kepada rekan-rekan media dan mereka membantu publikasi keluar. Pencegahan propaganda juga dengan membuat pemberitaan, *press release* yang menjelaskan situasional pada persoalan tersebut namun tidak terlepas dari arahan komandan. Kegiatan yang pernah

diselenggarakan berupa nonton bareng Film G30S/PKI yang melibatkan seluruh masyarakat juga upaya untuk pencegahan propaganda ideologi radikal.

Menurut ungkapan kepala Humas tiga instansi tersebut bahwa fungsi dan tugas humas di masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda sehingga prosedur humas yang dijalankan juga tidak sama. Merupakan upaya menetralsir paham radikal bagi yang terpengaruh dan serta bagi masyarakat yang sudah memiliki ideologi radikal dapat melepaskan diri dari paham-paham radikal yang menjerumus kearah teroris agar dapat terhentinya penyebaran ideologi radikal secara meluas kepada masyarakat. Upaya menetralsir paham-paham radikal dilakukan melalui metode interdisipliner seperti psikologi, agama, sosial, ekonomi, teknologi, politik dan budaya. penanganan hal tersebut juga harus dilakukan prinsip kesetaraan, pembinaan serta pemberdayaan yang tepat agar pemerintah daerah maupaun lembaga yang berwenang terhindar dari tuduhan kesewenangan terhadap kelompok tertentu.

Kejadian radikalisme yang terjadi yang mengarah pada tindakan terorisme di wilayah Kabupaten Bogor diungkapkan

¹⁵ Wawancara tatap muka dengan Maribun Gultom kepala Humas dan Media DISKOMINFO kab. Bogor Desember 2017

secara serentak oleh Polres, Diskominfo maupun Korem 061/SK kejadian yang terletak di Kecamatan Ciampea perihal masalah yang dilakukan oleh ormas dan di Kecamatan Taman Sari mengenai pembakaran umbul-umbul. Kejadian di Kecamatan Taman Sari beberapa media mainstream seperti Koran dan televisi sudah memberitakan hal tersebut kemudian ketika sudah dikroscek oleh unsur Muspida, kemudian Diskominfo membuat hasil pertemuan dari penanganan di lapangan. Itulah konter propaganda yang dilakukan karena unsur Muspida menangani langsung dilokasi kejadian. Permasalahan tersebut merupakan persoalan yang dianggap sensitif tanpa ada koordinasi dengan unsur terkait, Diskominfo tidak berani menyampaikan kepada publik. Sedangkan Humas Polres Bogor juga menyatakan bahwa untuk masalah radikal hanya bagian sub intel yang menangani hal tersebut, dan menangani propaganda hanya sub intel yang melakukan. Humas hanya meliput, mendokumentasikan kegiatan. AKP Ita juga menceritakan terkait kejadian pembakaran umbul-umbul di wilayah taman sari, jadi pada bulan Agustus dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia. Masyarakat memasang umbul-

umbul disekitar Yayasan Ibnu Masud, salah Satu warga melihat pembakaran tersebut di Yayasan Ibnu Masud. jadilah keramaian sehingga Polres langsung melakukan penangkapan, upaya tersebut agar tidak adanya hal anarkis oleh masyarakat. Memang bukan lambang Negara, bendera memang ada ukurannya soal yang memutuskan bersalah atau tidak, kepolisian tidak memiliki wewenang dalam memutuskan bersalah namun hal tersebut harus melewati proses hukum sampai pengadilan yang dapat menyatakan bersalah. kasus tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait antar jaringan maupun modusnya. Korem 061/SK juga sama dengan Polres melakukan pengaman dalam permasalahan Ibu Masud agar masyarakat terhindar dari tindakan anarkis. Koordinasi Korem mengenai Pembakaran umbul-umbul merah putih di Ibnu Masud kepada BNPT. Karena Korem hanya memiliki tanggung jawab sebatas pengamannya wilayah. Hal ini juga dengan terkaitan dengan perwakilan lembaga FKPT (forum kordinasi pencegahan teroris).

Masalah propaganda ideologi radikal yang mengarah terorisme tidak secara langsung di tindak lanjuti oleh BNPT. BNPT sendiri memiliki keterwakilan

di Daerah yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dimana diawaki oleh unsur-unsur lokal ada unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan tentunya melibatkan unsur Pemda, karena pengurusnya hanya terdiri 8 orang. Dimana disitu ada ketua dan sekertaris, bidang agama, pemuda dan perempuan banyak bidang lainnya.

Sedangkn menurut KH Mukri Aji sebagai ketua MUI Kabupaten Bogor. Ciri khas warga muslim Kabupaten Bogor memiliki ciri beraqidah ahlussunah wal jamaah dan bermazhab syafi'i, faham-faham yang dianut yaitu moderat dan toleran, itu khas muslim Kabupaten Bogor. Ketika ada penangkapan terduga teroris diwilayah Bogor, cenderung ditemukan adalah warga pendatang atau berasal dari daerah lain yang melakukan tindakan teror.

MUI juga berani memberikan *statmen* secara tegas mengenai siapa saja yang memiliki ideologi radikal di wilayah Kabupaten Bogor. Seperti Pondok pesanter Ibnu Masud, pondok pesantrennya itu diteliti oleh MUI, bukan pondok pesantren namun atas nama saja di Kecamatan taman sari karena tempat tersebut hanya lembaga tahfidz dan tempat perkumpulan preman. Ketua yayasan sudah menjelaskan dan pada saat

ini sudah ditutup. Jenis radikal kanan seperti wahabi yang sudah lakukan proses mediasi dan konfresi dengan berdasarkan pertimbangan karena sesuai dengan prosedur (SOP) MUI. Hal tersebut berjalan terus dilevel kecamatan bersama Muspida kecamatan, majelis ulama kecamatan, bersama Camat, Polsek, Koramil ataupun level desa, kades dengan Babinsa maupun Babinmas.

Gejala apapun terdeteksi secara cepat, menggunakan media sosial secara online. Penyebar ideologi radikal seperti Radio Rodja, dan Radio Fajri Cilengsi yang dakwahnya seolah-oleh fulgar tegakan amar maruf nahi mungkar tapi melewati prosesi hukum positif. menyimpang atau radikal atau sesat. seperti Gafatar yang katakanlah ada kaitannya dengan terorisme, di Kabupaten sendiri yang paham sesat ada 18 salah satunya yang mendesak harus ditutup yaitu kampus Mubarak milik Ahmadyah. Sesuai adanya peraturan Bupati dan Pergub setelah ini fonis dari Mahkamah Agung dan pernyataan Muspida Plus Kab. Bogor. Adanya pernyataan bersama dibuat oleh Notaris. mengenai Paham sunnah, Nasahurun tahun 2006, dipengadilan negri diselesaikan baik-baik, paham isa Bugis, Paham al-Haqi (hukum eling, tidak solat tidak puasa hanya eling saja)

Musodek mengaku menjadi nabi, Fajar Siliwangi yang menganggap Prabu Siliwangi menjadi nabi dan memiliki syahadat menyembah prabu siliwangi, paham gafatar yang memisahkan diri di wilayah Kalimantan, faham Lia Eden yang mengaku menjadi malaikat jilbril dan sebagai Satrio Pinoto Buono. Umumnya yang memiliki paham sesat mengaku sebagai nabi atau jibril. Hingga MUI menyatakan sesat, mengaku mendapat wahyu namun untuk membaca Al-Quran tidak bisa. Dengan demikian propaganda ideologi yang berada diwilayah Kabupaten Bogor cukup beragam. Pencegahan maupun penanganan mengenai ideologi radikal tidak hanya stakeholder maupun aparat yang berwenang yang melakukan pencegahan propaganda ideologi radikal. bukan hanya BNPT maupun MUI yang menanganinya namun dibutuhkan kesadaran seluruh element, baik masyarakat maupun pemerintah dan lembaga yang merupakan bentuk pencegahan. Kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Propaganda ideologi radikal yang mengarah pada terorisme adalah pembakaran umbul-umbul.

Hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Bogor

dengan Polres dan Korem terjalin dengan adanya Komunikasi yang saling berkaitan dengan bentuk kerjasama antara hal tersebut seperti pertemuan langsung dilapangan ketika terjadi suatu kasus dan juga pertemuan-pertemuan berkala dalam Forum Komunikasi Kepala Daerah (Forkominda), baik Komunikasi Inteligen Daerah (Kominda) untuk bagian Inteligen pimpinan Daerah, dan Perhumas untuk persatuan seluruh humas lembaga di wilayah Kabupaten Bogor, dengan saling bertukar informasi dan penanganan dalam permasalahan mengenai propaganda ideologi radikal.

Analisis kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah Kabupaten Bogor memiliki Dinas komunikasi dan Informasi ataa Diskominfo dengan Polres dan Korem 061/SK. Hal ini menjelaskan secara jelas bahwa kodim yang melakukan kerjasama dan kordinasi dengan Diskominfo dan Polres. Korem bersifat koordinator dari Kodim itu sendiri namun memiliki Korem Memiliki jangkauan yang lebih luas dari Kodim dan Korem khusus memiliki Kepala Penerangan yang melakukan hubungan humas dengan Berbagai Instansi dan lembaga di Wilayah Korem 061/SK. Dengan terjalin adanya kerjasama yang saling berkaitan dan keterlibatan satu

sama lain saat adanya suatu temuan kasus yang terjadi, dengan bentuk kerjasama antara hal tersebut seperti pertemuan langsung dilapangan ketika terjadi suatu kasus dan juga pertemuan-pertemuan berkala dalam musyawarah pimpinan (Muspida), komunitas Intel daerah (Kominda) untuk bagian Intelegen Daerah.

Bentuk Koordinasi salah satunya adalah koordinasi horizontal. Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederaja antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres). Muspida Plus sendiri sebagaimana lembaga yang setara dengan instansi tersebut seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Bogor. Kedudukan Bupati/Walikota sebagai koordinator pemerintahan di daerahnya tidak diatur secara jelas di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Karena Bupati/Walikota bukan lagi sebagai Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka komposisi dan hubungan kerja dalam Forum MUSPIDA perlu ditata ulang.

Kepala Daerah karena jabatannya adalah juga Kepala Wilayah. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Kepala Wilayah menjalankan fungsi koordinasi

terhadap semua instansi vertikal dan dinas daerah yang ada diwilayahnya.¹⁶

Sedangkan dalam tataran humas, kerjasama terjalin dengan adanya lembaga Perhumas untuk persatuan seluruh humas lembaga di wilayah Kabupaten Bogor, dengan saling bertukar informasi dan penanganan dalam permasalahan mengenai propaganda ideologi radikal. Namun kerjasama tersebut hanya berkaitan dengan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polres, Diskominfo maupun Korem. Sesuai dengan teori menurut kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.¹⁷ Proses kerjasama ini sudah sangat jelas tujuannya mengarah pada persatuan Indonesia yang dimana bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Menjaga kedaulatan Negara dari ancaman nyata seperti dalam

¹⁶ PP Nomor 6 Tahun 1988

¹⁷ Abdulsyani. Skematika, Teori, Dan Terapan. (jakarta: bumi aksara) 1994 hal 56

buku putih pertahanan bahwa radikalisme adalah bentuk ancaman nyata bagi Indonesia, dalam penelitian ini khususnya Kabupaten Bogor.

Kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar kerjasama yang dilakukan oleh Diskominfo, Polres dan Korem dalam pembagian tugas ini yang dirasa masih belum terlaksana dengan optimal, tidak adanya bentuk perjanjian yang tertulis ataupun MoU yang mengikat antar instansi dan lembaga yang akhirnya kecenderungan memiliki ketimbangan dalam tugas maupun tidak adanya rasa keterlibatan secara serius karena dengan alasan bukan kewenangannya.

Proses pelaksanaan kerjasama belum sepenuhnya terpenuhi, mengapa demikian karena masih ada saling tertutup mengenai informasi antar lembaga tersebut. Untuk tahapan saling mengerti antara Diskominfo, Polres dan Korem 061/SK apabila ada sebuah kasus yang perlu dihadapi saja. Dalam kegiatan bersama untuk melakukan pencegahan belum sistematis yang mengatur secara jelas dan rinci dalam pembagian apa saja yang menjadi ranah untuk kerjasama. Seharusnya kerjasama yang terjalin antara Diskominfo, Polres dan Korem yang

dalam lingkup ini dapat terwakilkan oleh Kodim ada kerjasama yang terselenggara secara rutin.

Prinsip-prinsip kerjasama tentu memiliki orientasi tercapainya tujuan yang baik, tentu setiap lembaga tersebut memiliki tujuan secara umum. Demikian kepentingan Kabupaten Bogor aman dan tentram, seperti selogan dari Kabupaten Bogor yaitu tegar beriman. Hingga memperhatikan kepentingan bersama dan prinsip saling menguntungkan. Sejauh penelitian ini dari masing-masing instansi yang melakukan kerjasama dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain, yang memiliki harapan bahwa wilayah Kabupaten Bogor tetap kondusif dan pergerakan sekecil apapun dapat terdeteksi dengan cepat agar pencegahan dapat dilakukan dengan tupoksi yang dijalankan masing-masing lembaga maupun instansi tersebut.

Tentu manfaat dari kerjasama yang terjalin dapat membantu citra positif yang terbentuk dimasyarakat tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Polres Bogor maupun Korem 061/ Surya Kencana Bogor. Sehingga masyarakat percaya pada pemerintah maupun aparat keamanan. Program yang dibuat pemerintah terhadap masyarakat akan diterima dan diserap masyarakat secara

tepat dan cepat. Hingga manfaat tersebut dapat sangat terasa untuk mencegah propaganda ideologi radikal di wilayah Kabupaten Bogor. Perkembangan dunia komunikasi pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan seiring dengan pesatnya laju teknologi yang semakin lama semakin canggih. Sama halnya dalam konteks instansi pemerintahan yaitu Polres Bogor, Korem, Diskominfo, dan MUI. Mereka melakukan koordinasi dan komunikasi apabila terjadi upaya-upaya tindakan radikalisme dan terorisme. Karena perkembangan dunia teknologi saat ini biasanya antar instansi memiliki pola dan saluran tersendiri dalam mengkomunikasikan informasi kepada instansi lain sehingga bisa saling *check and recheck*. Selain itu antar instansi juga melakukan olah TKP bersama apabila dilapangan terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Dalam penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa setiap instansi memiliki tugas pokok masing-masing. Sehingga tidak tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Korem 061/SK berdasarkan hasil wawancara mendalam mereka melakukan penjagaan dan antisipasi supaya tidak terjadi tindakan yang mengancam keamanan suatu wilayah. Sehingga Korem akan

selalu berkoordinasi dengan Polres apabila dilapangan mereka melakukan penjagaan dan penyisiran supaya oknum/pelaku yang disinyalir melakukan tindakan radikal/ terorisme dapat diminimalisir pengaruh negatifnya. Komunikasi sendiri dikatakan oleh Houvland dan Everett adanya pertukaran informasi yang mendalam dan menimbulkan suatu efek tertentu yang meningkatkan sebuah pemahaman, merubah pandangan hingga perilaku.

Pola komunikasi tersebutlah yang dihadapkan saling memberikan efek untuk menciptakan hubungan lembaga yang saling memiliki keterkaitan kuat karena dalam satu wilayah. Saling tukar informasi tersebut dilakukan oleh Polres, Korem maupun Kodim dan Diskominfo yang melakukan hubungan komunikasi yang dilakukan oleh para kepala instansi tersebut dan juga antara intelejen dengan yang terpenting sesama humas yang menjadikan sepemahaman dalam memandang dan menanagani pencegahan propaganda ideologi radikal.

Pola komunikasi yang strategis juga akan terjalin dengan tepat dan efektif apabila memilih media maupun ruang yang tepat untuk saling berkoordinasi antar lembaga dengan pola komunikasi saling tukar informasi dan koordinasi. Proses

komunikasi yang dilakukan oleh humas tidaklah mudah tidak dapat dilakukan secara personal. Humas dalam instansi maupun lembaga harus dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah untuk membangun dan menjaga saling pengertian antar organisasi.

Berbicara tentang strategi tentunya dalam penelitian ini humas tidak hanya melakukan penyebaran berita namun juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Terutama dalam lingkup wilayah Kabupaten Bogor. Baik humas Polres, Pemda dan Korem. Dalam hal ini terlihat dengan adanya persatuan Perhumas sebagai organisasi antar humas yang dijalankan dan di ikuti sebagai wadah informasi maupun koordinasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Humas Polres, Korem 061/SK dan Diskominfo (Pemda).

Dalam penelian ini Diskominfo memiliki kewenangan yang cukup besar dalam sirkulasi informasi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Hal demikianlah tentu menjadikan Diskominfo Kabupaten Bogor ini sebagai Center antara hubungan Polres dan Korem yang dalam hal koordinasi terwakili oleh kodim. Dengan melihat tugas dan tanggung jawab Kabupaten Bogor tersebut.



Gambar 4.4. Tugas dan kewenangan Diskominfo Kabupaten Bogor
Sumber: bogorkab.go.id, 2017

Penelitian ini tentu tugas humas dalam melakukan fungsi manajemen terlepas dari kebijakan dan tugas pokok lembaga tersebut karena humas polres, Diskominfo kabupaten Bogor dan Korem 061/SK seharusnya memiliki cara penanganan propaganda ideology radikal dengan memnfaatkan media yang dimiliki dan menjalankan fungsi kehumasan sebagai mestinya dengan berkerjasama dengan lembaga lainnya dan melakukan koordinasi yang jelas dan sistematis. Tidak hanya kerjasama dalam persatuan perhumas dan unsur muspida saja namun harus terdokumentasi baik bentuk perjanjian kerjasama maupun perumusan Mou secara jelas dalam pencegahan popaganda ideology radikal karena mencegah lebih baik daripada penanganan ideology radikal yang sudah menjadi tindakan terorisme.

Ideologi radikal dalam konteks ini membahas mengenai paham yang diajarkan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan menganggap

dirinya paling benar dan yang lain salah. Hal tersebut harus diluruskan pandangan yang demikian apabila ideologi radikal disebarluaskan oleh kelompok radikal maka kesetabilisan keamaan akan terganggu. semestinya ideologi radikal menjadi ancamannayata yang harus dihadapi seluruh element, baik pemerintah maupun masyarakat karena sudah menjadi hal yang memannngu. Kondisi Kabupaten Bogor saat ini yang tergolong heterogen meciptakan potensi masyarakat dengan berbagai macam sudut pandang mengenai pemahaman sebuah kebenaran. Ideologi radikal pada dasarnya memiliki makna yang luas, namun dewasa ini mengalami penyempitan makna hanya pada konteks agama. Kondisi tersebut bukanlah hal yang baru, karena memang pada saat ini isu agama dan radikalisme dianggap menjadi satu paket permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa kasus seperti yang sudah dikemukakan di poin hasil seperti pembakaran bendera sang saka merah putih, dan lain-lain menjadi sekelumit isu tindakan radikalisme yang terjadi di Kabupaten Bogor dan sampai saat ini masih menjadi sentral fokus penanganan yang berwajib.

Radikalisme yang terjadi di Kabupaten Bogor masih didominasi oleh

radikalisme agama. Walau istilah tersebut kurang sesuai digunakan dan menimbulkan distorsi pemaknaan, namun fenomena tersebut sudah lazim digunakan oleh masyarakat.

Radikalisme agama merupakan istilah yang tidak tepat digunakan karena bertentangan dengan logika murni dan sarat dengan makna yang mengalami distorsi, sebab radikalisme faham yang mengatasnamakan agama secara anarkis, sementara semua agama di dunia ini tidak ada yang memiliki ajaran dan doktrin yang anarkis, merusak dan menganeksasi wilayah resmi sebuah Negara. Semua manusia mendambakan suasana hidup damai, tenang, sejahtera dan sentosa, bahkan manusia yang tidak memiliki agama atau tidak percaya agama pun semua mendambakan kedamaian. Kalau radikalisme atas nama agama itu yang banyak terjadi saat ini dan telah menjadi fenomena sosial keagamaan dalam masyarakat dunia saat ini.¹⁸ Dalam lingkungan strategis, kelangsungan kehidupan terdapat pengembang paham-paham radikal melalui propaganda dan secara teknologi masa kini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat

¹⁸ Irfan Idris. Membumikan Deradikalisasi Soft Approach model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan. (Jakarta: Daulat Perss). 2014 hal 59.

dengan mudah baik menggunakan media konvensional seperti, majalah, Koran, Pamflet. Media elektronik televisi, radio dan melalui media sosial yang kini dengan mudahnya di akses baik konten website, Youtube, twitter, Instagram, facebook, whatsapp, dan media lainnya. Bahkan sebuah media chat yang bernama telegram sudah pernah ditutup oleh pemerintah Indonesia itu terjadi karena terduga menjadi alat bagi para kaum radikal yang menyebarkan propaganda pahamnya untuk mengarah pada radikal yang bertujuan kearah anarkis ataupun menjadi teroris, dengan penggunaan telegram seluruh informasi dapat di dapatkan dengan cepat dan mudah.

Hal tersebut juga di kuatkan oleh jurnal Ahmad Asrori bahwa Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarjinalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Sedangkan cara tepat di dalam antropisitas radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan; Peran Masyarakat Sipil; Beberapa Isu Kritis; Peran Deradikalisasi; Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan Pendekatan Kesejahteraan. Proses propaganda

ideologi radikal banyak terjadi melalui pengaruh kelompok-kelompok radikal, yang menasar pada sasaran individu yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, basis keagamaan atau budaya yang tidak melekat dengan baik pada individu tersebut hingga secara mudah terbawa pengaruh. Selanjutnya radikalisasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan seorang anak didik yang belajar secara tajam dan mendalam. Sama halnya dengan istilah imunisasi sebuah proses meningkatkan daya tahan seseorang dari segala macam penyakit terutama dilakukan pada anak usia balita. Istilah radikal dan radikalisasi masih sangat sangat umum dan tidak ada makna yang terkait dengan doktrin keagamaan. Hanya saja image yang ada di dalam masyarakat istilah radikal itu telah mengalami distorsi dan pergeseran makna kepada yang lebih sempit, menyudutkan dan penuh kecurigaan bagi pihak tertentu.

Adapun istilah radikalisme merupakan faham yang berupaya melakukan perubahan secara gradual, dan proses yang cepat, dengan menggunakan kekerasan, anarkis serta tidak segan-segan mengatasnamakan agama, membungkus perilaku anarkis dengan pakaian keagamaan, dan

mengemas aksi kejahatan dengan narasi-narasi keagamaan. Akibatnya, masyarakat awam dengan mudah mendukung dan ikut berpartisipasi mensupport aksi anarkisme tersebut. Anarkisme dibalut dengan jihad, pembunuhan dibungkus dengan istilah jihad, mati, mati dalam aksi anarkis seperti itu langsung dianggap mati syahid. Bukan hanya istilah jihad yang disalahgunakan, istilah hijrah pun dirampas dari makna aslinya ke dalam makna yang sangat menyeramkan. Sejatinya hijrah merupakan proses transformasi baik fisik maupun batin dan pikiran dari sebuah tempat yang tidak aman menuju lokasi yang lebih aman dan damai, dari suasana dan lingkungan yang sumpek menuju kondisi yang kondusif untuk melahirkan buah pikiran, ide dan gagasan yang membangun, pikiran yang mensejahterakan sesama dan gagasan yang memajukan agama bangsa dan Negara.

Istilah yang perlu dipahami pada saat ini ialah radikal teroris, dalam istilah ini juga memiliki banyak varian seperti radikal premanisme maupaun radikal separatism. Kedua radikal ini banyak di Indonesia. Radikal premanisme banyak diperlihatkan dilayar televisi maupun pemberitaan lain mengenai tawuran antar warga, tawuran antar mahasiswa, hingga

aksi oknum yang intoleran. Namun yang paling membahayakan adalah ideology radikal yang mengancam ideology pancasila. Kelompok yang ingin membuat Negara atapun memisahkan diri dari Indonesia. Kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Bogor ini adalah pembakaran umbul-umbul merah putih di Desa Taman Sari pondok pesantren Ibnu masud tersebut.

Analisa dalam penelitian ini mengenai masalah sosial di wilayah Kabupaten Bogor yaitu pembakaran umbul-umbul di Ibnu Masud disebabkan berbagai faktor yang amat kompleks. Pertama, berkaitan dengan euphoria kebebasan, dimana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauanya tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian terdapat gejala menurunnya toleransi. Kedua, masih berlanjutnya fragmentasi politik dan sosial khususnya dikalangan elit politik, sosial, militer, yang terus mengimbas ke lapisan bawah (*grassroot*) dan menimbulkan konflik horizontal yang laten dan luas. Terdapat berbagai indikasi, konflik dan kekerasan bernuansa agama.

Seperti pembakaran umbul-umbul merah putih tersebut namun di lakukan dilingkungan pesantren. Bahkan

propaganda ideology radikal yang cukup kental untuk kepentingan mereka sendiri. Ketiga, tidak konsistennya penegakan hukum. Beberapa kasus konflik dan kekerasan yang bernuasa agama atau membawa simbolisme agama menunjukkan indikasi konflik di antara aparat keamanan, dan bahkan kontestasi diantara kelompok-kelompok elit lokal. Keempat, meluasnya disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat Indonesia, karena kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya membuat kalangan masyarakat semakin terhimpit dan terjepit. Akibatnya, orang-orang atau kelompok yang terhempas dan terkapar ini dengan mudah dan murah dapat melakukan tindakan emosional, dan bahkan dapat disewa untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan kekerasan seperti aksi terorisme. Upaya penanggulangan terorisme harus terus dilakukan pemerintah salah satunya melalui pembuatan undang-undang dan penerbitan Peraturan Pemerintah. Karena propaganda ideology radikal adalah dasar dari adanya tindakan terorisme. Pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang

pemberantasan tidak pidana terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Polres dan Korem 061/SK maupun Kodim tentunya menjadi lebih agresif terhadap munculnya propaganda. Melihat dari kejadian Pembakaran Umbul-umbul di Ibnu Masud Kecamatan Taman Sari semua lembaga berkumpul saat ada kejadian tersebut. Sedangkan seharusnya hal tersebut dapat dicegah dengan adanya pencegahan propaganda ideology radikal dengan berbagai program masing-masing lembaga namun tetap berkoordinasi antara satu dan lain lembaga tersebut sehingga adanya kerjasama dan komunikasi untuk kepentingan masyarakat.

Melihat dari urgensi banyaknya paham radikal yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor terkait dengan data dari MUI. Gambaran tahap radikalisme di masyarakat dari pandangan BNPT. Pada tahap ini menggamakan bahwa pusat gerakan radikalisme teroris adalah pada kelompok inti (*hardcore*) yaitu aktor intelektual; yang bergerak dibalik persebaran ideology radikal tersebut. Bada dasar inilah dapat dikategorikan pelaku yang milian yang dapat melakukan proses “cuci otak”. Sehingga ideology

radikal yang di anutnya membuat keyakinan semakin berani untuk melukan teror bahkan menjadi pengganti dalam terror pengeboman yang mengakibatkan bunuh diri. Kelompok ini yang merupakan ancaman utaman karena merupakn pimpinan yang mampu menguasai situasi dan kondisi dan menjadi sutradara maupun prosedur yang menyusun sekenario teror. Ring kedua yaitu para eksekutor yang melakukan peledakan bom. Dan di ring ketiga kelompok pendukung yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku teror berupa dana, senjata, media rekrutmen, dan tempat pelatihan. Sedangkan ring selanjutnya kelompok simpatisan yang memiliki dukungan untuk pelaku teror namun tidak meleakukan aksi terorisme secara langsung. Dan biasanya kelompok ini yang memberikan dukungan ideologis dengan memfasilitasi penyebaran radikal. Dan meyebarkan propaganda ideologi radikal. Kelompok ini seringkali bersikaf eksklusif dan tidak dapat berbaur dengan masyarakat. Sedangkan lapisan luar secara umum rentan menjadi menjadi sasaran penyebaran ideology radikal terorisme. Atas dasar ini tentunya menyikapi kasus yang terjadi diwilayah Kabupaten Bogor *stakeholder* terutama dalam penelitian ini

Diskominfo, Polres dan Korem melakukan pencegahan propaganda ideologi radikal berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan kepada msyarakat agar tidak terkena ideologi radikalisme. agar propaganda ideologi radikal terputus dan tidak berkembang kemasyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Daerah, Polres dan Korem 061/SK dilakukan oleh humas dalam ruang organisasi perhumas sebagai tempat tukar informasi sesama humas, pada tahap pimpinan dilakukan oleh Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) atau juga dikenal sebagai Forkopinda (Forum komunikasi pimpinan Daerah). Dilakukan rutin setiap bulan dalam tataran Bupati, KaPolres, Danrem, Dandim beserta lembaga yang memiliki kedudukan setara untuk melakukan koordinasi. Begitu juga bagian intelejen melakukan Forkominda yaitu forum Komunitas Intelejen Daerah, setiap instansi dan Lembaga di Kabupaten Bogor dalam melakukan koordinasi dan penyelidikan dilapangan terkait masalah yang terjadi mengenai ideologi radikal maupun permasalahan lain. Namun kerjasama antar lembaga tersebut tidak terikat secara jelas dalam

aturan, perjanjian maupun MoU sehingga hanya sebatas koordinasi apabila terjadi kasus belum kearah pencegahan bersama secara dini. Terlihat dari hal tersebut masih adanya ego sektoral dalam penanganan permasalahan propaganda ideologi radikal yang mengarah pada masalah terorisme hal tersebut di atur menurut kewenangan tugas masing-masing lembaga.

Propaganda ideologi radikal di Wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2015-2016. Bentuk propaganda radikal di Kabupaten Bogor berhubungan erat dengan radikalisme agama. Kabupaten bogor yang mengalami kompleksitas permasalahan sosial yang cukup tinggi karena berada pada wilayah strategis sebagai penunjang Ibu Kota. tentu stakeholder yang terkait dalam hal ini seperti Diskominfo, Polres dan Korem 061/SK melakukan pencegah dengan menggunakan media yang dimiliki masing-masing instansi dan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga, untuk menghadapi kelompok masyarakat yang telah menyimpang pada arah radikal.

Pencegahan propaganda ideologi radikal tentu dengan melawan wacana-wacana keagamaan yang ekstrim dan menyesatkan dengan pemberitaan

bersifat *counter* propaganda yang menggunakan media masa maupun media social yang berkembang saat ini. pemberitaan yang berimbang dan tidak meresahkan dimasyarakat dapat menjadi hal yang efektif dan menjalankan program kegiatan yang sifatnya mendekati diri dengan masyarakat agar masyarakat tidak mudah percaya dengan hoax yang disebarkan oleh para propagandis. Hal tersebut dilakukan oleh Diskominfo, Polres dan Korem 061/SK. Media-media yang dimiliki lembaga yang terkait juga didukung dengan masyarakat dengan sigap dan kerjasama hingga permasalahan yang diharapkan oleh *stakeholder* Kabupaten Bogor terutama Diskominfo, Polres dan Korem 061/SK terkordinasi melalui peran humas hingga terlaksana dalam pencegahan propaganda ideologi radikal.

Masalah ideologi radikal yang terjadi yang dihadapi bersama mengenai pembakaran umbul-umbul di Ponpes Ibnu Masud dapat di tangani dan lakukan diproses hukum berkelanjutan. hingga saat ini setiap propaganda mengenai ideologi radikal yang mengarah pada terorisme direspon cepat untuk ditangani Polres, Diskominfo dan Korem 061/SK sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Akar permasalahan

terorisme diwilayah Kabupaten Bogor adalah ideologi radikal, ideologi radikal sendiri terdapat beberapa temuan yang mengarah pada radikal agama, kelompok radikal mempunyai ideologi yang memperbolehkan kekerasan dan anarkisme dari hal tersebut sehingga kemudian memaksakan kehendak dengan mengganti ideologi Negara.

Kondisi Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah luas, dan multicultur dengan kondisi masyarakat yang heterogen permasalahan ideologi radikal terorisme dihadapi secara serius oleh Pemda, Polres dan Korem

Saran

Dari simpulan yang telah disebutkan di atas maka peneliti merumuskan beberapa saran yang bersifat membangun sebagai bahan masukan, Persoalan kerjasama dalam pencegahan propaganda ideologi radikal menjadi hal yang sangat penting dari sebuah proses komunikasi antar lembaga di wilayah kabupaten Bogor. Peneliti menganggap proses komunikasi dapat mempengaruhi kerjasama antar instansi baik Pemda, Polri maupu TNI. Jika dilihat dari kasus yang pembakaran umbul-umbul di Ponpes Ibnu Masud maka komunikasi untuk melakukan kerjasama antar instansi baik Polres, Pemda dan

Korem masih belum dijalankan secara optimal terlebih pada humas yang melakukan *release* berita tersebut. Komunikasi terjadi setelah ditemukan kasus dilapangan dan mekanisme koordinasi yang masih belum tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Untuk itu, perlu sekiranya ditemukan kajian-kajian lebih lanjut tentang kerjasama pencegahan propaganda ideologi radikal yang mengarah pada terorisme, nantinya secara akademis dan teoritis akan dapat dicapai penanganan propaganda ideologi radikal secara efektif, holistik dan komprehensif.

Penanganan terorisme tidak hanya menjadi persolan bagi Indonesia namun Negara lainpun. hal ini menjadi permasalahan yang serius. Bahkan tidak hanya Negara berkembang namun juga Negara maju. Bagi Indonesia sendiri yang memiliki 34 Provinsi menjadi hal yang cukup jeli dalam penganan karena tidak hanya ibukota namun juga wilayah Poso menjadi target dari teroris tersebut. Dalam melakukan pencegahannya tentu harus dari dasar dan mendalam. Ideologi radikal yang menjadi dasar pelaku melakukan tindakan terorisme. Khususnya Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini terdapat berbagai paham

radikal. Sekiranya untuk itu, perlu dijalankan kebijakan-kebijakan yang mengarah (berorientasi) pada keterlibatan masyarakat (*civil society*). Melalui pendekatan praktis yang mengarah pada pencegahan propaganda ideologi radikal. Yang tidak lagi menjadi urusan Pemerintah saja namun juga element-element di Wilayah Daerah mapunpun seluruh Indonesia secara menyeluruh.

Harus adanya keterlibatan masyarakat dan bergarai tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Akademisi, berbabagi stakeholder melakukan berkerjasama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri. tentu perlu dibangun saluran-saluran formal untuk penanganan persoalan berkaitan dengan ideologi radikal. Dengan demikian dari berbagai hambatan yang dihadapi Diskominfo, Polres dan Korem, maka penelihan ini dapat memberikan rekomendasi. Bahwa ketiga institusi harus memiliki terobosan baru dalam melakukan kerjasama dalam sekala yang luas menggunakan proses komunikasi maupun kehumasannya dengan instasi lain yang berada di Wilayah Kabupaten Bogor. Artinya kalangan masyarakat harus terlibat dalam proses tersebut, dan berbagai stakeholder maupun tokoh,

Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam hal ini harus sesuai dengan Peraturan Daerah atau Perda agar tidak terjadinya buffer actors sehingga hubungan kerjasama yang terjalin antar ketiga instansi tersebutpun tentu harus memiliki bentuk perjanjian kerjasama yang tertulis dan jelas secara badan hukumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali Syafa'at, Muchamad. (2003). *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi"*. Jakarta : Imparsial.
- Abdulaziz, Saleh, Alshebil. (2007). *Consumer Perception of Rebranding The Case of Logo Changes*. Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro. (2013). *Hand Book Of Public Relation*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bugin, Burhan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen komunikasi dan Informatika. (2013). *Fungsi, Peran dan tugas humas*. Jakarta.
- F Nova, Firsan. (2011). *Crisis Public Relations*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Foley, Jhon dan Julie Kedrik. (2006). *Balanced Brand*. Jakarta: Trans media.
- Gupta, Deepak. (2005). *Handbook Of Advertising Media And Public Relations*. New Delhi: Mittal Publication.
- Hariwijaya. (2007). *Metodologi dan teknik penulisan, skripsi, Tesis, dan*

- Disertasi. Yogyakarta: Elmaterra Publisng.
- Idris, Irfan. (2016). *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach* model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan. Jakarta: Daulat Perss.
- Kotler, Philip & Waldemar Pfoertsch. (2006). *B2B Brand Management*. Jerman: Springer Berlin.
- Kusumastuti, Firda. (2001) *Dasar-Dasar Humas*, Malang: Ghalia Indonesia.
- Lexy J.Moleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Lexy J, Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. (1998). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasir, Abas. (2012 Januari). *Kajian tentang Terorisme*, Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tantang Terorisme diDitjenstarahan Kemhan.
- Onong Uchjana, Effendy. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Prawito. (2007). *Penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta:LKIS.
- Rumanti, Maria Assumpta. (2002). *Dasar-Dasar Public Relations*, Jakarta: Grasindo.
- Ruslan, Rosadi. (2000). *Kiat dan Strategi Kampanya Public Relation*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. (2008). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2002). *Metodelogi penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekamto, Soerjono. (2005). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvinaro (2010). *Dasar-dasar Publik Relation*.Bandung: Rosda.
- Suharto, Bohar. (1993). *Petunjuk Praktis mengenai Penelitian, Fungsi, Format, Bimbingan dan Cara penulisan Karya karya Imliah (Makalah, Sekripsi dan Tesis)Ilmu Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Sukendro, Achmed. (2009). *Basic Hospital Public Relation*. Jogjakarta: Amara Books.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*. yogyakarta: Andi Offset.
- Umar, Husein. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Soaial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saputra, Wahidin & Nasrullah, Rully. (2011) *Public Relation 2.0*. Depok: Gramata publishing.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Woon, Liu Shuk. (2011). *How Customers Asses Rebranding Strategy The Impact Percieved Brand Image Similiarity and Loyalty Before Rebranding*. The Hong Kong Polytechnic university: M Phill.
- Yunus, Hadi Sabari. (2011). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Tantalo, Caterina and Priem, Richard L. *Value Creation Through Stakeholder Synergy*. Strategic Management Journal Strat. Mgmt. J. (2014) Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/smj.2337

Junaedi, Fajar. *Relasi Terorisme dan Media*.
Jurnal ASPIKOM. Volume 1, Nomor
1, Juli 2010: 1-124

Muhammad, Ali. *International Context Of
Indonesia's Counter-Terrorism Policy,
2001 – 2004*.

